

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhamad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana (Percobaan & Penyertaan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 2006, *KUHP & KUHP*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara, Jakarta
- Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang sistem pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo Bandung
- E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisivs, Yogyakarta
- G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta
- H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Habib Adjie, 2014, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris di Indonesia (Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 30 Tahun 2004)*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Liliana Tedjosapatro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang
- Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Grafika, Yogyakarta
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan KUHP (Penyelidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta

- Made Wiratha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*, Andi Yogyakarta
- Masyhur Efendi, 1994, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Mujiatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung,
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Philipus M.Hadjon, 2001, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentik*, Surabaya Post, Surabaya
- R. Subekti, 1983, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Salim Hs, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo persada, Jakarta
- Salim HS, DKK, 2007, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta
- Salman Otjie dan Susanto, Anthon F, 2013, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris, CV. Farisma Indonesia*, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarto, 1991, *Hukum Pidana I A - IB*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

- Suherman, 1979, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II, Alumni, Bandung
- W.A. Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Garfika, Jakarta
- Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, ELSAM, Jakarta

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata)
- Keputusan Kongres Ikatan Indonesia (INI) tentang Kode Etik
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Bagian V angka (6).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman
- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, ditetapkan di Bandung, pada tanggal 28 Januari 2005
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

C. Karya Ilmiah dan Jurnal

- Abdullah, “*Peranan Notaris dalam Pernbuatan Kontrak Bisnis*”, makalah disajikan pada Workshop Pengembangan Unit Revenue Generating untuk Memacu Peningkatan Kualifikasi Akademik rnelalui Program Layanan Kepakaran Legal Aspek Industri dan Sektor Usaha, pada Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, TPSDP, BATCH III 2006, Mataram, 13-14 Januari 2006
- Achmad Arif Kurniawan, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Pekerja Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Jurnal, UNS, 2017

- Ahmad Reza Andhika, Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perkara Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Jurnal Hukum
- Aryani Witasari, Wewenang MPD Pasca Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 49 /PUU-X/2013 Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Notaris, Jurnal Hukum Unissula, 2016
- Habib Adjie, Jurnal Renvoi, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret 2015
- Herlin Budiono, "*Peluang dan Hambatan Implementasi Cyber Notary di Indonesia*", Seminar nasional "*Eksistensi Notaris dalam Aktivitas Cyber Notary*", Bandung, 17 Maret 2012.
- Hilda Sophia, Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP, Jurnal Wawasan Hukum 2015, Bandung
- Irene Dwi Enggarwati, Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang
- Ima Erлие Yuana, "*Tanggung jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris*", Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas, Diponegoro
- Mudofir Hadi, "Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72", Pembatalan Isi Akta Notaris "Dengan Putusan Hakim" (September 1991) : 142-143.
- Muhammad Fadli Bachtiar, *Implikasi Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya sebagai Pejabat Umum terhadap Akta yang dibuatnya*, Jurnal Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar
- Nur Cahyanti, Sri Endah Wahyuningsih, *Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Akta Unissula, 2018
- Sugiharto, Wakil Ketua MPW Jawa Tengah, pada Rapat Koordinasi MPD dan MPW Se Jawa Tengah, Makalah, 25 April 2015

D. Internet

<http://en.wikipedia.org>

www.hukumonline.com

<https://metro.tempo.co>